

## IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Oleh:  
**Ria Cheni Lapian<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

email:  
[rialapian9@yahoo.com](mailto:rialapian9@yahoo.com)

### ABSTRAK

Penerapan sistem akuntansi keuangan dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah adalah hal yang sangat penting. Laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis implementasi sistem akuntansi keuangan terhadap pengelolaan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan kuisioner terhadap 25 staff bidang keuangan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian diketahui bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan termasuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya untuk pengelolaan laporan keuangan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan termasuk dalam kategori baik. Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berkorelasi dengan pengelolaan laporan keuangan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan. Sebaiknya kepala Dinas dan pegawai yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga lebih banyak memahami standar akuntansi pemerintahan untuk pengolahan data sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

**Kata kunci:** sistem akuntansi, laporan keuangan, pemerintah daerah.

### ABSTRACT

*Application of financial accounting system in management of local government financial statements is a very important thing. The financial statements of local governments must meet the following characteristics: relevant, reliable, comparable and understandable. The purpose this study to analysis of the implementation of financial accounting system for the management of financial statements. This study used questionnaire data to 25 finance staff at Department of Education, Youth and Sports in South Minahasa District. Research result it's known the financial accounting system of local government in Department of Education, Youth and Sports in South Minahasa District included in this category are very good. Further the management of financial statements in Department of Education, Youth and Sports in South Minahasa District included in good categories. Application of financial accounting system of local government correlated with management of financial statements in Department of Education, Youth and Sports in South Minahasa District. Should the head office and existing employees in Department of Education, Youth and Sports in South Minahasa District be more understand of government accounting standards for data processing to produce quality financial statements.*

**Keywords:** accounting system, financial statements, local government.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Era reformasi ini di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai *good government governance* di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan bergulirnya otonomi daerah, kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Seiring diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 januari 2001 melalui Undang-Undang No.2 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, reformasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah salah satunya ditetapkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Laporan Keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010). Hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sistem akuntansi di Indonesia di tingkat pusat diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 pasal 232 juncto yang direvisi ke Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 232 yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Roviyantie, 2011).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota, mengacu pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. Dalam hal ini BPK dapat memberikan 5 macam opini yaitu: Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas, Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Pendapat Tidak Wajar (TW), dan Tidak memberikan Pendapat.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Pemerintahan

Bastian (2006:15) mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik sebagai: mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik. Sedangkan Bachtiar, Muhlis dan Iskandar (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

### Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai: serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sedangkan Bastian (2007:98) memandang sistem akuntansi pemerintah daerah dari proses atau prosedur baik itu dengan menggunakan metode manual maupun secara terkomputerisasi. Prosedur yang dimaksud dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah.

### Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- 3) Neraca (N)
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan Atas Laporan keuangan (caLK)

### Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

#### 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

#### 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitu: penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas.

#### 3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.



#### 4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

### **Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan pelaksanaan dalam menerapkan seluruh komponen dalam sistem akuntansi keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.

#### **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Ho: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berkorelasi dengan Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Ha: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berkorelasi dengan Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan, dan waktu penelitian dimulai sejak bulan Oktober 2014 sampai bulan Desember 2014.

#### **Prosedur Penelitian**

Penulis melakukan kajian awal dengan melakukan studi literatur baik studi kepustakaan maupun membaca melalui internet. Kemudian melakukan pengidentifikasian tentang masalah, merumuskannya, menetapkan tujuan/ manfaat penelitian, kemudian membatasi masalah ke lingkup yang disesuaikan dengan penelitian saat ini. Perancangan dan persiapan survai pada objek penelitian yang telah ditentukan, kemudian pengumpulan data baik primer melalui kuisioner kepada karyawan atau staff di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. Melakukan pengolahan data, membahasnya kemudian menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran guna melengkapi penelitian.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian explanatory, penelitian explanatory adalah suatu metode penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan kejelasan fenomena yang terjadi secara empiris dan berusaha untuk mendapatkan jawaban hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Menurut Sugiyono (2011:10) penelitian explanatory adalah suatu metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan kausal antara variabel satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis.

#### **Sumber Data**

Sumber data menurut Kuncoro (2011:138) terbagi atas 2 bagian, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Data Primer:

Data primer adalah data yang di peroleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data yang di publikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya.

### Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden yang merupakan karyawan atau staaf di bagian akuntansi atau keuangan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Kuesioner adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang telah disusun sedemikian rupa untuk dijawab oleh responden, biasanya disertai alternatif-alternatif jawaban (Sekaran, 2006).

### Metode Analisis Data

#### Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan dan kevalidan suatu alat ukur atau instrumen penelitian. Validitas menunjukkan seberapa baik suatu instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur (Sekaran, 2006). Alat pengukur yang absah akan mempunyai validitas yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Untuk menguji validitas alat ukur atau instrumen penelitian, terlebih dahulu dicari nilai (harga) korelasi dengan menggunakan Rumus Koefisien Korelasi Product Moments Pearson sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - \sum X^2) \times (n \sum Y^2 - \sum Y^2)}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah responden

Y = Jumlah skor total seluruh item Yi

X = Jumlah skor tiap item Xi

Setelah nilai korelasi (r) didapat, kemudian dihitung nilai thitung untuk menguji tingkat validitas alat ukur penelitian dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah responden

Setelah nilai thitung diperoleh, langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai thitung tersebut dengan nilai ttabel pada taraf signifikansi sebesar  $\alpha = 0,05$  dan derajat kebebasan (dk) = n - 2. Kaidah keputusannya adalah:

Jika thitung > ttabel, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah valid.

Jika thitung  $\leq$  ttabel, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah tidak valid.

#### Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran tanpa bias (bebas kesalahan) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen (Sekaran, 2006). Untuk menguji reliabilitas atau keandalan alat ukur atau instrumen dalam penelitian ini digunakan koefisien Alpha Cronbach. Koefisien keandalan menunjukkan mutu seluruh proses pengumpulan data suatu penelitian.

$$Alpha (\alpha) = \frac{k \cdot r}{1 + (k - 1) \cdot r}$$

Keterangan:

k = Jumlah variabel manifes yang membentuk variabel laten

$r$  = Rata-rata korelasi antar variabel manifes

### Pengujian Hipotesis

Untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dilakukan pengujian hipotesis menggunakan korelasi spearman dengan model statistik uji t, yang rumusnya sebagai berikut :

$$t = r_s \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_s^2}}$$

Dimana:

$r_s$  = koefisien korelasi spearman

$n$  = Banyaknya sampel

Dengan ketentuan :

$\alpha = 0,05$

Df =  $n - (k+1)$

Dimana :

$n$  = Jumlah data responden

$k$  = Variabel independent

$l$  = Variabel dependent

### Operasional Variabel Penelitian

#### Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk tahun 2014. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengihktisan, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

#### Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk tahun 2014. Laporan keuangan yang berkualitas adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi untuk pengelolaan laporan keuangan sehingga dapat memenuhi tujuannya, yaitu: andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan

Dinas Pendidikan berdiri tahun 2003 bersamaan dengan berdiri/terbentuknya Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Drs. H. J. Donald Wagey dan sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) Jhony M. Lamia, SPd. Pada tahun 2006 terjadi pergantian Kepala Dinas Pendidikan yang baru J. M. Lamia, SPd dan sebagai KTU Drs. Djemy Robot. Pada tanggal 19 Februari 2008 terjadi pergantian Nomenklatur dari Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan, dan masih dipimpin oleh Kepala Dinas J. M. Lamia, SPd dan sebagai Sekretaris Drs. Djemy Robot. Pada September 2008 terjadi pergantian Kepala Dinas yang baru yaitu DR. Jeffry S. J. Lengkong, MPd dan sebagai Sekretaris Frederik M. M. Sumual, SPd. Pada tahun 2010 kembali terjadi pergantian Kepala Dinas yang baru Drs. Jan A. Rattu, MPd dan sebagai Sekretaris Frederik M. M. Sumual, SPd. Pada tanggal 13 Februari 2013 terjadi pergantian Sekretaris yang baru Hendrie S. C. Lumapow, SH, MSi. Dan pada tanggal 31 Desember 2014 terjadi pergantian pimpinan Kepala Dinas yaitu Hendrie S. C. Lumapow, SH, MSi. Dan terakhir pada tanggal 31 Desember 2014 terjadi pergantian Kepala Dinas dari Hendrie S. C. Lumapow, SH, MSi kepada Ollyvia K. Lumi, SSTP, MSi sebagai kepala Dinas yang baru.

## Visi dan Misi

### Visi

Adapun visi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan adalah: “Mengoptimalkan pengelolaan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang lebih baik dalam rangka mewujudkan masyarakat yang beriman, mandiri, berkualitas dan berdaya saing”.

### Misi

Misi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan yaitu:

1. Tercapainya tata kelola dan pencitraan publik penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik.
2. Mewujudkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Mewujudkan pelayanan dan melakukan pembinaan pendidikan, pemuda dan olahraga yang lebih partisipatif dan kompetitif.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga dalam pembangunan daerah.
5. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang partisipatif, transparan, demokratis dan akuntabel.
6. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian pemuda dalam pembangunan di berbagai bidang.

### Gambaran Umum Responden

Data yang diperoleh dari survey penelitian harus diolah terlebih dahulu agar dapat dianalisis dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan atau staff yang ada pada bagian keuangan atau akuntansi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan. Jumlah responden yaitu sebanyak 25 responden.

**Tabel 1. Statistik Responden**

No	Keterangan	Jumlah Responden	Presentase(%)
1.	Masa Kerja		
	1-5 Tahun	5	20%
	6-10 Tahun	14	56%
	10-15 Tahun	4	16%
	>15 Tahun	2	8%
	<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>
2.	JenisKelamin		
	Pria	9	36%
	Wanita	16	64%
	<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>
3.	JenjangUsia		
	20 – 30 Tahun	2	8%
	31 – 40 Tahun	8	32%
	41 – 50 Tahun	9	36%
	>50 Tahun	6	24%
	<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

*Sumber : hasil pengolahan data, 2014*

Tabel 1 menunjukkan bahwa masa bekerja 6-10 tahun merupakan responden terbanyak dalam penelitian yaitu sebesar 56% , sedangkan yang terendah yaitu masa bekerja >15 tahun yaitu 8%. Untuk jenis kelamin wanita lebih besar yaitu 64% dibandingkan dengan pria yang hanya sebesar 36%. Sedangkan responden dengan jenjang usia 41-50 paling banyak yaitu 36% sedangkan jenjang usia paling sedikit adalah 20-30 yaitu 8%.



**A. Gambaran Mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah****Tabel 2. Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintah**

Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Mean Skor
1. Sistem akuntansi yang diterapkan pada dinas ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.	9	16	0	0	0	109	125	87,2%	4,4
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>125</b>	<b>87,2%</b>	<b>4,4</b>

Sumber : hasil pengolahan data, 2014

**Tabel 3. Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Dengan Standar Pencatatan Akuntansi Yang Berlaku Umum**

Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Mean Skor
2. Setiap transaksi keuangan pada Dinas ini dilakukan dengan analisis transaksi/identifikasi transaksi.	6	16	2	1	0	102	125	81,6%	4,1
3. Pada dinas ini dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan.	9	16	0	0	0	109	125	87,2%	4,4
4. Setiap transaksi keuangan pada dinas ini didukung oleh bukti transaksi.	8	17	0	0	0	109	125	86,4%	4,3
5. Pada dinas ini semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis.	5	20	0	0	0	109	125	86,4%	4,2
6. Pada dinas ini dilakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi.	6	18	1	0	0	109	125	81,6%	4,1
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>87</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524</b>	<b>625</b>	<b>83,8%</b>	<b>4,2</b>

Sumber : hasil pengolahan data, 2014

**Tabel 4. Pembuatan Laporan Keuangan Dan Dilaporkan Secara Periodik**

Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Mean Skor
7. Pada dinas ini dilakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya.	11	14	0	0	0	111	125	88,8%	4,4
8. Sistem pengendalian dilakukan dalam mengukur dan melaporkan pencatatan.	9	16	0	0	0	109	125	87,2%	4,4
9. Pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi.	7	16	2	0	0	105	125	84%	4,2
10. Pelaporan laporan dilakukan secara konsisten dan periodik.	10	15	0	0	0	110	125	88%	4,4
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>500</b>	<b>87%</b>	<b>4,3</b>

Sumber : hasil pengolahan data, 2014



**B. Gambaran Mengenai Pengelolaan Laporan Keuangan****Tabel 5. Laporan Keuangan Harus Andal, Relevan, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami**

Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Mean Skor
1. Laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan di masa lalu.	7	15	3	0	0	104	125	83%	4,1
2. Laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang.	3	17	4	1	0	97	125	77,6%	3,9
3. Penyajian/penerbitan laporan keuangan tepat waktu sesuai periode akuntansi.	8	14	3	0	0	105	125	84%	4,2
4. Laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan.	9	14	1	1	0	106	125	84,8%	4,2
5. Laporan keuangan menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan.	8	15	2	0	0	106	125	84,8%	4,2
6. Informasi laporan keuangan apabila diuji oleh pihak berbeda akan mewujudkan simpulan yang berbeda.	0	10	7	7	1	76	125	60,8%	3,0
7. Informasi laporan keuangan berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.	0	12	6	4	3	77	125	61,6%	3,1
8. Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	8	13	4	0	0	104	125	83,2%	4,2
9. Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.	3	14	5	3	0	92	125	73,6%	3,7
10. Informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas	6	17	2	0	0	106	125	84,8%	4,2

**Tabel 5. Laporan Keuangan Harus Andal, Relevan, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami (lanjutan)**

11. Laporan keuangan yang sudah disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.	8	15	2	0	0	106	125	84,8%	4,2
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>156</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>1079</b>	<b>1375</b>	<b>78,3%</b>	<b>3,9</b>

Sumber : hasil pengolahan data, 2014

## Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

### Hasil Pengujian Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Dalam pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui apakah pernyataan yang telah diterapkan dalam kuisisioner dapat mengukur variabel yang telah ada. Pengujian validitas ini dilakukan dengan mengkorelasi skor jawaban responden dari setiap pertanyaan. Nilai R hitung dibandingkan dengan R tabel, apabila R hitung > R table maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap pertanyaan kuisisioner dari variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Butir Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Variabel X	Pertanyaan 1	,579	0,396	Valid
	Pertanyaan 2	,841	0,396	Valid
	Pertanyaan 3	,657	0,396	Valid
	Pertanyaan 4	,881	0,396	Valid
	Pertanyaan 5	,745	0,396	Valid
	Pertanyaan 6	,702	0,396	Valid
	Pertanyaan 7	,686	0,396	Valid
	Pertanyaan 8	,552	0,396	Valid
	Pertanyaan 9	,607	0,396	Valid
	Pertanyaan 10	,715	0,396	Valid
Variabel Y	Pertanyaan 1	,444	0,396	Valid
	Pertanyaan 2	,572	0,396	Valid
	Pertanyaan 3	,610	0,396	Valid
	Pertanyaan 4	,554	0,396	Valid
	Pertanyaan 5	,429	0,396	Valid
	Pertanyaan 6	,570	0,396	Valid
	Pertanyaan 7	,469	0,396	Valid
	Pertanyaan 8	,585	0,396	Valid
	Pertanyaan 9	,570	0,396	Valid
	Pertanyaan 10	,450	0,396	Valid
	Pertanyaan 11	,420	0,396	Valid

Sumber : hasil pengolahan data, 2014

Berdasarkan uji validitas terhadap variabel X sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah diperoleh kesimpulan bahwa pertanyaan dalam kuisisioner tersebut valid. Berdasarkan uji validitas terhadap variabel Y pengelolaan laporan keuangan diperoleh kesimpulan bahwa pertanyaan dalam kuisisioner tersebut valid.

## Hasil Pengujian Reliabilitas

### Realibilitas Variabel X Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai reliabilitas sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sebesar 0,919 nilai ini memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi karena  $r > 0,90$  sehingga variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sudah memenuhi kriteria reliabel.

### Realibilitas Variabel Y Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai reliabilitas pengelolaan laporan keuangan 0,849 nilai ini  $0,70 < 0,849 < 0,90$  termasuk memiliki tingkat keandalan tinggi sehingga variabel kualitas laporan keuangan sudah memenuhi kriteria reliabel.

## Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga telah diterapkan, maka dapat dilakukan suatu perbandingan antara thitung dengan t-tabel yang terdapat dalam tabel distribusi t. Adapun taraf nyata yang digunakan adalah  $\alpha = 0,05$  dengan derajat kebebasan (degree of freedom)  $df = n - 2$ . Pengujian hipotesis ini menggunakan model statistik uji t, untuk mengetahui thitung dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = r_s \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_s^2}} \quad t = 0,506 \frac{\sqrt{25-2}}{\sqrt{1-0,506^2}} \quad t = 2,818 \text{ (t hitung)}$$

dan untuk pengujian t-tabel diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{ttabel} &= t(\alpha; df) \\ &= (0,05; 23) \\ \text{ttabel} &= 2,068 \end{aligned}$$

Dari hasil pengujian thitung diatas didapat nilai 2,818 dimana ttabel 2,068, sehingga thitung  $2,818 > 2,068$  ttabel dengan kata lain dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berkorelasi dengan pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

## Pembahasan

### Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Sistem Akuntansi Keuangan pemerintah daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan termasuk ke dalam katagori sangat baik. Hal itu terlihat dari tanggapan responden mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang terbagi ke dalam tiga indikator yang terdiri dari:

#### 1) Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Karena sistem akuntansi pemerintahan merupakan pedoman bagi akuntansi pemerintahan baik pusat ataupun daerah. Berdasarkan garis kontinum, jumlah total mean skor tanggapan responden tentang kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan dari pernyataan diperoleh total mean skor sebesar empat koma empat. Dalam pengklasifikasian jumlah skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dari penelitian sebelumnya, berdasarkan garis kontinum jumlah total

mean skor tanggapan responden tentang kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan dari pernyataan diperoleh total mean skor sebesar empat koma empat.

## **2) Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Dengan Standar Pencatatan Akuntansi Yang Berlaku Umum**

Prosedur pencatatan akuntansi pemerintahan daerah harus didasarkan pada kesesuaian dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum. Berdasarkan garis kontinum, jumlah skor total tanggapan responden tentang prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum didapatkan total mean skor sebesar empat koma dua. Dalam pengklasifikasian jumlah total mean skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang prosedur pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum adalah sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur pencatatan akuntansi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan sudah sesuai dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum. Dari penelitian sebelumnya, berdasarkan garis kontinum jumlah total mean skor tanggapan responden tentang kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan dari pernyataan diperoleh total mean skor sebesar empat koma tiga.

## **3) Pembuatan Laporan Keuangan Dan Dilaporkan Secara Periodik**

Laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik untuk mengukur kinerja secara periodik dan untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan garis kontinum, jumlah skor total tanggapan responden tentang pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik dari pertanyaan diperoleh total mean skor sebesar empat koma tiga. Dalam pengklasifikasian jumlah total mean skor tanggapan responden termasuk dalam kategori sangat baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa baik dalam pembuatan laporan keuangan dan pelaporan laporan keuangan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sudah sesuai dan dilakukan secara periodik. Dari penelitian sebelumnya, berdasarkan garis kontinum jumlah total mean skor tanggapan responden tentang kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan dari pernyataan diperoleh total mean skor sebesar empat koma empat.

## **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami, yang adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

### **1) Laporan Keuangan Harus Andal, Relevan, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami**

Sesuai dengan garis kontinum jumlah total skor tanggapan responden tentang laporan keuangan harus andal, relevan, dapat dibandingkan, diperoleh rata-rata skor sebesar tiga koma sembilan. Dalam pengklasifikasian total mean skor tanggapan responden termasuk dalam kategori baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan laporan keuangan yang di buat oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sudah memenuhi kriteria andal, relevan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Dari penelitian sebelumnya, berdasarkan garis kontinum jumlah total mean skor tanggapan responden tentang kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan dari pernyataan diperoleh total mean skor sebesar tiga koma sembilan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan termasuk kedalam katagori sangat baik. Hal itu terlihat dari total tiga indikator yang pada garis kontinum berada pada interval sangat baik. Secara keseluruhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga tergolong sangat baik.



2. Pengelolaan Laporan keuangan pemerintah daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga termasuk ke dalam katagori baik. Hal itu terlihat dari hasil indikator yang pada garis kontinum berada pada interval baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan merupakan laporan keuangan yang berkualitas.
3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan pemerintah daerah berkorelasi dengan Pengelolaan Laporan Keuangan pemerintah daerah di Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Minahasa Selatan.

### Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga perlu memperhatikan sistem akuntansi keungan yang digunakan, baik dalam memahami dalam penggunaannya, dalam hal mengetahui standar akuntansi pemerintahan sehingga dalam mengolah data keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.
2. Untuk peneliti berikutnya disarankan menggunakan objek penelitian tidak terbatas hanya sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah, namun dapat menambah variabel independen lain yang mungkin juga memilki hubungan dengan pengelolaan laporan keuangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Arif, Muhlis dan Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Edisi Pertama. Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sekor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kuncoro. 2011. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Depdagri, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Roviyantie, Devi. 2011. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/2883/2385>. Diakses Februari 8, 2014. Hal 4,5.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2011a. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2011b. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.